

# ANALISIS RASIO TREND KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH OTONOM PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2005 – 2007

Amirullah \*)

***Abstract** : The research method used in this study is a quantitative method of trend analysis. The results of the discussion was the financial independence of the autonomous counties / cities in South Sulawesi province in 2004 until the year 2007 as the Autonomous Region counties / cities in South Sulawesi province in the period in the category of financial independence is very low. And in the category of instructive relationship patterns, namely the role of the central government is more dominant than the independence of local governments. Trend Luwu financial independence, and the District Pinrang him very well with a static trend in the range of financial independence above 100% with compared to other districts. In 2007, compared with base year 2004, the trend of financial independence autonomous county / city in South Sulawesi province increase, the District of Bone and Sinjai.*

***Keyword** : vertical imbalances, horizontal imbalance, instructive, Consultative, Participative, delegative, trend analysis*

## **Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2002) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio

kemandirian, dan rasio efektifitas, sedangkan rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan.

## **Otonomi Daerah**

Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri.” Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai

daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2002:167) adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

### **Rasio Keuangan**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169).

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)**

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut "Rasio KKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya., yang dapat diformulasikan (Halim, 2004:128) sebagai berikut :

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggam-

barkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin

tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

### **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil SDA dan Non SDA, Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

### **Pola Hubungan Pusat-Daerah**

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1  
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

### Kerangka Pikir

Reformasi keuangan daerah telah terjadi ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setiap Pemerintah.

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang juga setiap daerah kabupaten/kota menerapkan otonomi daerah. Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi secara penuh dalam pencapaian yang namanya efektifitas dan juga kemandirian akan daerah otonom demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah otonom. Dimana, efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, dengan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka berarti makin tinggi efektifitasnya

Sedangkan kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi). Secara Umum, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang juga berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, dan efektif suatu daerah atau wilayah juga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparaturnya daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah.

### METODE ANALISIS

Metode analisis adalah suatu bentuk penganalisaan di dalam menguraikan informasi ke dalam bagian-bagian atau komponen-komponen dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap permasalahan yang timbul dan menjadi kebutuhan bagi peneliti untuk mencari kebenaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa analisis trend.

### Analisis Trend

Analisis trend digunakan untuk mengetahui, baik arah perkembangan kemandirian keuangan maupun efektifitas keuangan daerah. Persamaan untuk trend kemandirian keuangan daerah dan efektifitas keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Apabila persentase trend KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase trend KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Apabila persentase trend EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase trend EKD maka arah perkembangan efektifitas keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik. Sebaliknya bila persentase kurang dari 100%, maka terjadi penurunan efektifitas keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan seperti hasil rasio KKD pada tabel 13 maka mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang – undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai yang dikemukakan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001:168) seperti yang digambarkan pada tabel 2, dapat dipetakan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan seperti terlihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2  
Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	KAB / KOTA	2004	2005	2006	2007
1	Bantaeng	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
2	Barro	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
3	Bone	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
4	Bulukumba	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
5	Enrekang	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
6	Gowa	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
7	Jeneponto	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
8	Kep. Selayar	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
9	Luwu	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
10	Luwu Timur	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
11	Luwu Utara	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
12	Makassar	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
13	Maros	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
14	Palopo	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
15	Pangkep	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
16	Pare – Pare	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
17	Pinrang	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
18	Sidrap	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
19	Sinjai	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
20	Soppeng	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
21	Takalar	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
22	Tana Toraja	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
23	Wajo	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masuk pada pola instruktif, atau peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian

pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah secara finansial.

### Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Trend kemandirian keuangan daerah otonom menggambarkan kecenderungan arah perkembangan kemandirian keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar.

#### Perhitungan Trend KKD :

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD pada } t_0 + 1}{\text{KKD pada } t_0} \times 100\%$$

#### Trend KKD Tahun 2005

Berdasarkan pada tabel 13 mengenai rasio kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumus untuk menghitung Trend KKD Tahun 2005 yakni sebagai berikut :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{KKD tahun 2005}}{\text{KKD tahun 2004}} \times 100\%$$

1. Bantaeng =  $\frac{3,67}{3,69} \times 100\% = 99,46\%$
2. Barru =  $\frac{4,63}{4,98} \times 100\% = 92,97\%$
3. Bone =  $\frac{5,22}{5,62} \times 100\% = 92,88\%$
4. Bulukumba =  $\frac{4,65}{4,78} \times 100\% = 97,28\%$
5. Enrekang =  $\frac{6,04}{5,6} \times 100\% = 107,86\%$
6. Gowa =  $\frac{7,69}{7,66} \times 100\% = 100,39\%$
7. Jeneponto =  $\frac{3,37}{2,95} \times 100\% = 114,24\%$
8. Kep. Selayar =  $\frac{4,25}{2,81} \times 100\% = 151,25\%$
9. Luwu =  $\frac{4,29}{4,08} \times 100\% = 105,15\%$

10. Luwu Timur =  $\frac{5,9}{3,94} \times 100\% = 149,75\%$
11. Luwu Utara =  $\frac{7,39}{7,2} \times 100\% = 102,64\%$
12. Makassar =  $\frac{24,29}{19,25} \times 100\% = 126,18\%$
13. Maros =  $\frac{6,48}{6,33} \times 100\% = 102,37\%$
14. Palopo =  $\frac{8,87}{8,56} \times 100\% = 103,62\%$
15. Pangkep =  $\frac{14,88}{15,11} \times 100\% = 98,48\%$
16. Pare – Pare =  $\frac{12,22}{10,70} \times 100\% = 114,21\%$
17. Pinrang =  $\frac{5,42}{4,55} \times 100\% = 119,12\%$
18. Sidrap =  $\frac{6,62}{7,32} \times 100\% = 90,44\%$
19. Sinjai =  $\frac{6,5}{7,45} \times 100\% = 87,25\%$
20. Soppeng =  $\frac{3,42}{3,4} \times 100\% = 100,59\%$
21. Takalar =  $\frac{3,52}{3,08} \times 100\% = 114,29\%$
22. Tana Toraja =  $\frac{5,6}{6,29} \times 100\% = 89,03\%$
23. Wajo =  $\frac{8,2}{6,54} \times 100\% = 123,38\%$

#### Trend KKD Tahun 2006

Berdasarkan pada tabel 13 mengenai rasio kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumus untuk menghitung Trend KKD Tahun 2006 yakni sebagai berikut :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{KKD tahun 2006}}{\text{KKD tahun 2005}} \times 100\%$$

1. Bantaeng =  $\frac{3,85}{3,67} \times 100\% = 104,90\%$
2. Barru =  $\frac{5,02}{4,63} \times 100\% = 108,42\%$

$$\begin{aligned}
3. \text{ Bone} &= \frac{3,98}{5,22} \times 100\% = 76,25\% \\
4. \text{ Bulukumba} &= \frac{5,46}{4,65} \times 100\% = 117,42\% \\
5. \text{ Enrekang} &= \frac{5,81}{6,04} \times 100\% = 96,19\% \\
6. \text{ Gowa} &= \frac{8,34}{7,69} \times 100\% = 108,45\% \\
7. \text{ Jeneponto} &= \frac{2,9}{3,37} \times 100\% = 86,05\% \\
8. \text{ Kep. Selayar} &= \frac{4,16}{4,25} \times 100\% = 97,88\% \\
9. \text{ Luwu} &= \frac{3,52}{4,29} \times 100\% = 82,05\% \\
10. \text{ Luwu Timur} &= \frac{6,17}{5,9} \times 100\% = 104,58\% \\
11. \text{ Luwu Utara} &= \frac{4,58}{7,39} \times 100\% = 61,98\% \\
12. \text{ Makassar} &= \frac{19,5}{24,29} \times 100\% = 80,28\% \\
13. \text{ Maros} &= \frac{5,69}{6,48} \times 100\% = 87,81\% \\
14. \text{ Palopo} &= \frac{6,7}{8,87} \times 100\% = 75,54\% \\
15. \text{ Pangkep} &= \frac{12,18}{14,88} \times 100\% = 81,85\% \\
16. \text{ Pare – Pare} &= \frac{9,68}{12,22} \times 100\% = 79,21\% \\
17. \text{ Pinrang} &= \frac{5,49}{5,42} \times 100\% = 101,29\% \\
18. \text{ Sidrap} &= \frac{6,1}{6,62} \times 100\% = 92,15\% \\
19. \text{ Sinjai} &= \frac{4,92}{6,5} \times 100\% = 75,69\% \\
20. \text{ Soppeng} &= \frac{3,38}{3,42} \times 100\% = 98,83\% \\
21. \text{ Takalar} &= \frac{3,07}{3,52} \times 100\% = 87,22\% \\
22. \text{ Tana Toraja} &= \frac{4,94}{5,6} \times 100\% = 88,21\%
\end{aligned}$$

$$23. \text{ Wajo} = \frac{6,59}{8,2} \times 100\% = 80,37\%$$

### Trend KKD Tahun 2007

Berdasarkan pada tabel 13 mengenai rasio kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumus untuk menghitung Trend KKD Tahun 2007 yakni sebagai berikut :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{KKD tahun 2007}}{\text{KKD tahun 2006}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
1. \text{ Bantaeng} &= \frac{3,85}{3,85} \times 100\% = 100,00\% \\
2. \text{ Barru} &= \frac{4,98}{5,02} \times 100\% = 99,20\% \\
3. \text{ Bone} &= \frac{5,61}{3,98} \times 100\% = 140,95\% \\
4. \text{ Bulukumba} &= \frac{4,74}{5,46} \times 100\% = 86,81\% \\
5. \text{ Enrekang} &= \frac{5,2}{5,81} \times 100\% = 89,50\% \\
6. \text{ Gowa} &= \frac{7,05}{8,34} \times 100\% = 84,53\% \\
7. \text{ Jeneponto} &= \frac{3,12}{2,9} \times 100\% = 107,59\% \\
8. \text{ Kep. Selayar} &= \frac{5,77}{4,16} \times 100\% = 138,7\% \\
9. \text{ Luwu} &= \frac{3,42}{3,52} \times 100\% = 97,16\% \\
10. \text{ Luwu Timur} &= \frac{10,24}{6,17} \times 100\% = 165,96\% \\
11. \text{ Luwu Utara} &= \frac{4,14}{4,58} \times 100\% = 90,39\% \\
12. \text{ Makassar} &= \frac{19,48}{19,5} \times 100\% = 99,9\% \\
13. \text{ Maros} &= \frac{6,19}{5,69} \times 100\% = 108,79\% \\
14. \text{ Palopo} &= \frac{6,2}{6,7} \times 100\% = 92,54\% \\
15. \text{ Pangkep} &= \frac{11,75}{12,18} \times 100\% = 96,47\%
\end{aligned}$$

$$16. \text{ Pare - Pare} = \frac{9,64}{9,68} \times 100\% = 99,59\%$$

$$17. \text{ Pinrang} = \frac{5,65}{5,49} \times 100\% = 102,91\%$$

$$18. \text{ Sidrap} = \frac{4,32}{6,1} \times 100\% = 70,82\%$$

$$19. \text{ Sinjai} = \frac{5,27}{4,92} \times 100\% = 107,11\%$$

$$20. \text{ Soppeng} = \frac{4,34}{3,38} \times 100\% = 128,4\%$$

$$21. \text{ Takalar} = \frac{3,2}{3,07} \times 100\% = 104,23\%$$

$$22. \text{ Tana Toraja} = \frac{4,61}{4,94} \times 100\% = 93,32\%$$

$$23. \text{ Wajo} = \frac{6,81}{6,59} \times 100\% = 103,34\%$$

Untuk Rasio KKD daerah otonom di 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dari perhitungan rasio KKD pada tabel 13, dengan tahun dasar 2004, maka trend kemandirian keuangan tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah seperti tampak pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3  
Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen)

No.	KAB / KOTA	2005	2006	2007
1	Bantaeng	99,46	104,90	100,00
2	Barru	92,97	108,42	99,20
3	Bone	92,88	76,25	140,95
4	Bulukumba	97,28	117,42	86,81
5	Enrekang	107,86	96,19	89,50
6	Gowa	100,39	108,45	84,53
7	Jeneponto	114,24	86,05	107,59
8	Kep. Selayar	151,25	97,88	138,70
9	Luwu	105,15	82,05	97,16
10	Luwu Timur	149,75	104,58	165,96
11	Luwu Utara	102,64	61,98	90,39
12	Makassar	126,18	80,28	99,90
13	Maros	102,37	87,81	108,79
14	Palopo	103,62	75,54	92,54

15	Pangkep	98,48	81,85	96,47
16	Pare - Pare	114,21	79,21	99,59
17	Pinrang	119,12	101,29	102,91
18	Sidrap	90,44	92,15	70,82
19	Sinjai	87,25	75,69	107,11
20	Soppeng	100,59	98,83	128,40
21	Takalar	114,29	87,22	104,23
22	Tana Toraja	89,03	88,21	93,32
23	Wajo	125,38	80,37	103,34

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 17 di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Beberapa kabupaten/kota pada tahun 2007 memiliki trend kemandirian statis dengan tahun dasar 2004, seperti: Luwu Timur, Pinrang.
2. Dibandingkan dengan tahun dasar 2004, beberapa kabupaten/kota pada tahun 2005 memiliki trend kemandirian yang meningkat, kecuali: Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Pangkep, Sidrap, Sinjai, dan Tana Toraja. Sementara pada tahun 2006, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Bantaeng, Barru, Bulukumba, Gowa, Luwu Timur, dan Pinrang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan efektifitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Daerah Otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode tersebut masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sangat rendah. Dan masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.



Trend kemandirian keuangan Luwu Timur, dan Kabupaten Pinrang arahnya sangat baik dengan trend kemandirian keuangan statis pada kisaran diatas 100% dengan dibandingkan kabupaten lain.

Pada tahun 2007, dibandingkan dengan tahun dasar 2004, trend kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan, yakni Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Selatan dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio dan trend kemandirian.
2. Penetapan besaran kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan PAD.
3. Pemerintah daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun dan realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

Asaddin, Fuad dan Mansoer, Faried Wijaya. 2001. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur*, Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Vol. 1 No. 1.

Astuti, Dwi, 2004, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Bastian, Indra, 2003, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta:Erlangga

\_\_\_\_\_, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Erlangga.

Baswir, Revrison, 1999, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* : BPFE : UMP AMP YPKN.

Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.

Harahap, Sofyan S, 2004, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Jakarta:Bumi Aksara.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Indonesia*. IAI.

Kuncoro, Mudrajad.2003. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : BPF UGM.

\_\_\_\_\_, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi

Munawir, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Liberty.

Mudrajad Kuncoro.2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Straegi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Nordiawan, Deddi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat

- Prastowo, Dwi, 2005, *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : PT Rineka Cipta
- Prasetya, Gede, 2005, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Richard Holloway, 2003. *Menuju Kemandirian Keuangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saragih. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \*) Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar